

IDN/ANTARA



PERCEPATAN VAKSINASI COVID-19 BAGI PELAKU PARIWISATA

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno (kedua kanan) meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat dan pekerja pariwisata ekonomi kreatif di Sentra Vaksinasi STP Bandung, Jawa Barat, Sabtu (17/7). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan sedikitnya 90-95 persen dari 34 juta masyarakat pelaku dan pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif se-Indonesia bisa terfasilitasi program percepatan vaksinasi Covid-19 sehingga pemulihan ekonomi di sektor tersebut segera tercapai.

Penerimaan Negara dari Hulu Migas Mencapai Rp96,7 Triliun

“Harga ICP (Indonesian Crude Price) menunjukkan kenaikan, bahkan per Juni 2021 mencapai US\$70,23/barel. Momentum ini akan kami gunakan secara maksimal untuk mendorong KKKS agar lebih agresif dalam merealisasikan kegiatan operasi,” kata Dwi Soetjipto.

JAKARTA (IM) - Sektor hulu migas memberikan kontribusi sebesar US\$6,67 miliar atau setara Rp96,7 miliar (kurs Rp14.492) terhadap pendapatan negara pada Semester I tahun 2021. Harga minyak yang berangsur membaik (setelah sempat jatuh di tahun 2020 lalu), mendukung pencapaian tersebut.

“Seperti juga dirasakan oleh sektor lain, pandemi Covid-19 memberikan tantangan yang cukup berat bagi industri hulu migas. Namun SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menghadapi pandemi ini dengan melakukan usaha-usaha yang kreatif. Syukur pada Semester I tahun 2021 ini kami berhasil memberikan penerimaan negara yang optimal,” jelas Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto dalam keterangan tertulis, Minggu (18/7).

Dwi menjelaskan harga minyak berangsur membaik

setelah sempat jatuh di tahun 2020 lalu. Oleh sebab itu, pihaknya meyakini pendapatan negara dari sektor migas tahun ini bisa mencapai Rp154 triliun.

“Harga ICP (Indonesian Crude Price) menunjukkan kenaikan, bahkan per Juni 2021 mencapai US\$70,23/barel. Momentum ini akan kami gunakan secara maksimal untuk mendorong KKKS agar lebih agresif dalam merealisasikan kegiatan operasi,” urai Dwi. Ia menambahkan pendapatan yang dihasilkan juga tak terlepas dari upaya efisiensi dan kegiatan yang dilakukan SKK Migas di sektor hulu. Kegiatan yang dilakukan antara lain melalui pemilihan prioritas kegiatan work order, pemeliharaan rutin, dan efisiensi general administration khususnya akibat adanya pembatasan kegiatan.

“Upaya ini berhasil membuat biaya per barel pada Semester I tahun 2021 sebesar US\$12,17/BOE, lebih rendah

dibandingkan Semester I tahun 2020 sebesar US\$13,71/BOE,” kata Dwi.

Ia menyebut capaian lifting migas juga mencatatkan hasil yang baik pada Semester I - 2021, yakni rata-rata 1,64 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD). Dari jumlah tersebut, lifting minyak sebesar 667 ribu barel minyak per hari (BOPD), atau 95% dari target APBN yang ditetapkan untuk tahun ini sebesar 705 ribu BOPD. Sementara itu, lifting gas sebesar 5.430 MMSCFD dari target APBN sebesar 5.638 MMSCFD atau tercapai 96%.

Disebutkan Dwi, guna mengejar capaian target lifting,

SKK Migas dan KKKS tengah bahu membahu merealisasikan program Filling The Gap (FTG).

“Melalui Program FTG, telah ada tambahan minyak rata-rata 1.900 BOPD. Tambahan ini di luar rencana tambahan yang direncanakan dalam WP&B (Work, Program, & Budget) 2021. Ke depan, kami akan meneruskan Program FTG dan juga mengajak KKKS untuk melakukan akselerasi WP&B-nya sehingga diharapkan target APBN 2021 dapat terpenuhi,” papar Dwi.

Lebih jauh Dwi menambahkan, usaha lain yang dilakukan SKK Migas untuk mengejar capaian target adalah

mengupayakan tiga insentif hulu migas agar dapat disetujui oleh pemerintah.

“SKK Migas akan mengupayakan ketiga insentif hulu migas agar dapat disetujui oleh pemerintah tersebut adalah tax holiday untuk pajak penghasilan di semua wilayah kerja migas, penyesuaian biaya pemanfaatan Kilang LNG Badak sebesar US\$0,22 per MMB-TU, dan dukungan dari kementerian yang membina industri pendukung hulu migas (industri baja, rig, jasa dan service) terhadap pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas,” tandas Dwi. • dot

Kemenperin Dorong IKM Rebut Peluang Belanja Pemerintah Rp609,3 Triliun

JAKARTA (IM) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus melakukan beragam upaya strategis untuk memperluas akses pasar industri kecil dan menengah (IKM), terutama di tengah kondisi pandemi saat ini.

Salah satu langkahnya adalah mengajak pelaku IKM rutin memantau kebutuhan belanja modal dan barang pemerintah sebagai peluang pasar baru.

“Pasar yang saat ini menjanjikan adalah pasar pemerintah melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” kata Direktur Jenderal Gati Wibawaningsih, di Jakarta, seperti dilansir dari laman Kemenperin, Minggu (18/7).

Menurut Gati, peluang tersebut tercipta setelah pemerintah menggalakkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Perpres ini bertujuan untuk memprioritaskan produksi industri dalam negeri,” ujarnya. Gati mengungkapkan saat ini terdapat potensi belanja barang dan belanja modal Rp609,3 triliun pada APBN, yang dapat

dioptimalkan sebagai peluang pasar produk dalam negeri.

Jika dirinci per sektor, potensi penggunaan produk dalam negeri bisa berasal dari anggaran bidang ekonomi Rp511,3 triliun.

Selanjutnya, perlindungan sosial Rp260 triliun, pendidikan Rp175,2 triliun, pelayanan umum Rp526,2 triliun, kesehatan Rp111,7 triliun, pertahanan dan keamanan Rp303,7 triliun, serta anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp795,5 triliun.

“Oleh karenanya, saya meminta tolong kepada kepala dinas, atau pemerintah daerah agar memberikan kesempatan bagi IKM binaan untuk dapat menyuplai kebutuhan APBD juga,” tuturnya.

Adapun cara yang dipakai untuk menyerap produksi dalam negeri untuk menggantikan penyerapan produk impor, di antaranya melalui e-Katalog, e-tendering, toko daring, dan program belanjagada di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Berdasarkan catatan LKPP dalam transaksi pengadaan barang/jasa tertinggi melalui e-Katalog periode Januari 2020-Mei 2021, penyerapan anggaran belanja untuk barang/jasa produksi

dalam negeri baru mencapai Rp28,9 triliun. Sementara penyerapan anggaran belanja untuk barang/jasa dari produk impor tampak lebih tinggi, yaitu Rp31,3 triliun.

Dengan demikian, Kemenperin terus mendorong agar IKM dapat ikut serta dalam program belanja Kementerian dan Lembaga melalui belanja langsung secara elektronik dalam laman UMKM di e-Katalog LKPP. Sebab saat ini, tercatat baru 188 (39%) dari total 475 KM di katalog program e-Smart Ditjen IKMA, yang potensial dan dapat diikutsertakan dalam program belanjagada LKPP.

Gati menambahkan, program e-Smart IKM yang telah digelar Ditjen IKMA Kemenperin sejak empat tahun lalu, juga dapat meningkatkan literasi digital dan kemampuan penggunaan teknologi modern serta perluasan akses pasar IKM melalui marketplace.

“Ada pula program belanjagada yang khusus diperuntukkan bagi IKM sektor angkutan, makanan, kurir, alat tulis kantor, souvenir dan furnitur, dan akan ditambah dengan sektor kesehatan,” imbuhnya. • dro

Ekspor RI Tembus Rekor Baru Sebesar USD18,55 Miliar

JAKARTA (IM) - Neraca perdagangan periode Juni 2021 mencatatkan surplus sebesar USD1,32 miliar. Surplus ini menunjukkan tren surplus neraca perdagangan bulanan terus berlanjut sejak Mei 2020.

Kabar gembira lainnya, kinerja ekspor periode Juni 2021 berhasil mencatatkan rekor baru sejak Agustus 2011 dengan mencatatkan angka sebesar USD18,55 miliar.

“Pada periode Juni 2021, neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus dengan nilai USD1,32 miliar. Hal yang membanggakan kita semua, dari sisi ekspor, nilai total ekspor Indonesia mencapai USD 18,55 miliar dan menjadi yang tertinggi sejak Agustus 2011,” kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dilansir dari laman Kemendag, Minggu (18/7).

Menurut Lutfi, surplus neraca perdagangan bulan Juni 2021 ditopang oleh surplus neraca nonmigas sebesar USD 2,38 miliar dan terkontraksi defisit neraca migas sebesar USD 1,07 miliar.

Indonesia mencatatkan surplus dengan beberapa negara mitra dagang utama pada Juni 2021. Surplus nonmigas terbesar berasal dari Amerika Serikat (AS) yang mencatatkan nilai surplus USD1,24 miliar, Filipina USD0,65 miliar dan Belanda USD0,32 miliar.

Sementara itu, neraca perdagangan kumulatif Januari-Juni 2021 tercatat surplus USD11,86 miliar. Nilai tersebut diperoleh dari surplus perdagangan pada sektor nonmigas sebesar USD17,57 miliar pada Januari-Juni yang mampu menutupi defisit perdagangan migas yang mencapai USD5,70 miliar.

Bahkan, neraca perdagagan

gan kumulatif periode Januari-Juni 2021 jauh melampaui surplus perdagangan periode Januari-Juni 2020 yang tercatat senilai USD5,43 miliar.

Dari sisi eksponnya, nilai total ekspor Indonesia pada Juni 2021 tercatat sebesar USD18,55 miliar, naik 9,52% (MoM) dan secara tahunan naik sebesar 54,46% (YoY). Capaian ini melampaui kinerja ekspor April 2021 yang mencapai USD18,49 miliar.

Peningkatan kinerja ekspor pada Juni 2021 ini didorong oleh peningkatan ekspor sektor migas sebesar 27,23% (MoM) dan peningkatan ekspor nonmigas sebesar 8,45% (MoM).

Pada Juni 2021, kenaikan ekspor terjadi di seluruh sektor. Selain peningkatan ekspor di sektor migas, sektor pertanian juga tercatat naik 33,04% MoM, industri pengolahan naik 7,34% MoM, dan sektor pertambangan naik 11,75% MoM. Meroketnya ekspor sektor pertanian terutama disebabkan oleh membaiknya harga komoditas ekspor pertanian dan pulihnya permintaan dunia.

“Kinerja yang sangat baik pada seluruh sektor di masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini harus dipertahankan dengan menjaga status penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia tetap terkendali,” kata Lutfi

Impor Indonesia pada Juni 2021 mencapai USD 17,23 miliar, naik 21,03% MoM atau melonjak sebesar 60,12% YoY. Peningkatan kinerja impor pada Juni 2021 dipicu kenaikan impor migas sebesar 11,44% MoM menjadi USD 2,30 miliar dan kenaikan impor nonmigas sebesar 22,66% MoM menjadi USD 14,93 miliar. • pan



PERTUMBUHAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU NASIONAL

Pekerja menggergaji log kayu sengon menjadi menjadi produk papan sirap di sentra industri kayu olahan di Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (17/7). Kementerian Perindustrian menilai industri pengolahan kayu di Tanah Air mengalami pertumbuhan sebesar 8,04 persen pada kuartal I/2021 setelah pada tahun sebelumnya sempat mengalami kontraksi pada 2020.

INTERNATIONAL MEDIA, SENIN 19 JULI 2021



PULAUINTAN
General Contractor

PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

SU 01019
TELEPON KE LUAR NEGERI LANGSUNG DARI PONSEL

Telepon Hemat Ke Luar Negeri
Suara Jernih ngobrol pun nyaman

Cuma Rp 6an-/detik

Tekan Kode Akses 01019
TELKOMSEL dan XL

01019 Kode negara Kode area No Telepon yang dituju OK/Yes

Contoh (Malaysia - Kuala Lumpur): 01019 60 3xxxxxxx

https://www.facebook.com/GaharuTelecom https://www.twitter.com/GaharuTelecom

* Khusus untuk negara China, USA, Canada, Hong Kong, Singapore: tarif Rp 6an-/detik dengan menggunakan GSM Telkomsel
* Tarif belum termasuk PPN & pembatasan per 6 detik

INFO LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNGI
Customer Service : 021-634 5009
Mobile : 0811 17 50 291-95
SMS : 0811 17 50 369
E-mail : support@gaharu.co.id www.gaharu.co.id



UMKM COKLAT LOMBOK TETAP BERPRODUKSI DI MASA PANDEMI

Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengemas produk coklat Lombok Ankrella di Lingkungan, Peresak Tempit Ampenan Tengah, Mataram, NTB, Minggu (18/7). Pengusaha coklat Lombok Ankrella tersebut mengaku masih tetap berproduksi berdasarkan jumlah pesanan selama masa pandemi Covid-19 dengan memaksimalkan pemasaran digital atau beralih media pemasaran dari offline ke pemasaran daring.

Anggaran PEN Naik Jadi Rp744,7 Triliun

JAKARTA (IM) - Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanganan Covid-19 naik menjadi Rp744,75 triliun. Angka ini naik dari sebelumnya Rp699,43 triliun. “Ini sudah saya sampaikan pada 5 Juli di Sidang Kabinet dan sudah saya sampaikan di dalam rapat dengan DPR untuk laporan semester. Angka masih Rp699,43 triliun untuk program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, sekarang keputusan yang telah disetujui Bapak Presiden Rp744 triliun,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam video virtual, Sabtu (17/7).

Ia menjelaskan, kenaikan itu terjadi karena anggaran sejumlah insentif yang naik. Seperti anggaran kesehatan naik dari Rp193,93 triliun menjadi Rp214,95 triliun.

Kemudian, anggaran bantuan sosial Rp153,83 menjadi Rp187,84 triliun, untuk kenaikan ini karena berbagai anggaran bansos mengalami kenaikan. “Ini untuk dukungan insentif usaha Rp62,8 triliun, sementara dukungan UMKM turun karena hanya kredit modal kerja bukan pemberian bantuan tunai dari Rp 171,77 triliun menjadi Rp161,20 triliun,” ujarnya.

Dia menambahkan untuk bantuan program prioritas lainnya naik dari Rp117,04 menjadi Rp117,94. “Kami terus meneliti dan menyalurkan anggaran-anggaran baik di Kementerian/Lembaga maupun daerah supaya semuanya ditunjukkan prioritasnya sekarang adalah membantu rakyat menangani Covid-19 dan untuk membantu agar wirausaha bisa pulih kembali,” kata Sri Mulyani.

Kemenkeu juga menambah anggaran untuk Program Kartu

Prakerja dan subsidi upah. Sri Mulyani mengatakan, rencana pemberian subsidi gaji akan dimasukkan dalam Program Kartu Prakerja. “Program Prakerja dan bantuan subsidi upah untuk mendukung tenaga kerja,” bebernya.

Program Kartu Prakerja untuk 5,6 juta peserta akan mendapatkan tambahan sebesar Rp10 triliun. Rinciannya, untuk penambahan 2,8 juta peserta. “Kami akan tambahkan Rp10 triliun sehingga Kartu Prakerja menambah pesertanya,” katanya.

Sehingga dengan tambahan itu maka anggaran program kartu prakerja menjadi Rp30 triliun dari dengan total 8,6 juta peserta prakerja. “Program Kartu Prakerja membantu Prakerja,” katanya.

Sementara itu bantuan sosial untuk modal usaha bagi UKM segera dicairkan. Sri Mulyani akan memberikan Rp13,35 triliun untuk program pemberdayaan ekonomi.

Adapun, program itu masuk dalam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (APBD). Rinciannya, warung tegal dan usaha kecil akan mendapatkan bantuan

“Dalam APBD ada anggaran Rp12,11 triliun untuk perlindungan sosial dan Rp13,35 triliun untuk pemberdayaan ekonomi untuk usaha kecil, PKI, warteg, dan lainnya,” kata Sri Mulyani.

Selanjutnya, ada bantuan produktif bagi usaha mikro atau BLT UMKM yang menasar 3 juta penerima baru. “Pemberdayaan UMKM ada Rp11 triliun. Ini yang kita harap segera dicairkan sehingga bisa dirasakan langsung,” tandasnya. • dot